



**PERAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DALAM DISEMIANSI KEBIJAKAN DAERAH DI KABUPATEN
PANGANDARAN**

*The Role Of The Regional People's Representative Council Secretariat In The
Dissemination Of Regional Policies In Pangandaran Regency*

Elin Nurlianti¹, Dini Yuliani², Ii Sujai³

^{1,2,3}Universitas Galuh, Indonesia

Email : elinnurlianti@gmail.com

Abstract

Dissemination is an activity aimed at individuals and groups to raise their awareness of the importance of receiving, obtaining, and utilizing information. The Secretariat of the Pangandaran Regency Regional People's Representative Council (DPRD), as a supporting element of the legislative institution, plays a strategic role in disseminating information on regional policies to the public. This study aims to examine the role of the DPRD Secretariat in the dissemination of regional policies and their implementation in Pangandaran Regency. The method used was descriptive qualitative research, employing data collection techniques such as observation, interviews, and documentation, as well as data analysis through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the role of the Pangandaran Regency DPRD Secretariat has been carried out across all dimensions, though not yet optimally. This is due to the lack of structured standard operating procedures (SOPs), insufficient human resources, the public's limited understanding of legal policies, and unequal public access to available information channels. Despite facing various obstacles, the DPRD Secretariat continues to strive to improve policy dissemination. Therefore, thorough preparation is necessary, taking into account all indicators that may influence the success of regional policy dissemination.

Keywords: *Regional People's Representative Council Secretariat, Outreach, Regional Policy*

Abstrak

Diseminasi merupakan suatu perbuatan yang ditujukan kepada individu maupun kelompok agar memiliki kesadaran untuk menerima, memperoleh, dan memanfaatkan informasi. Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran sebagai unsur penunjang kelembagaan legislatif memiliki peran strategis dalam menyebarkan informasi kebijakan daerah kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Sekretariat DPRD dalam diseminasi kebijakan daerah serta implementasinya di Kabupaten Pangandaran. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran telah berjalan pada semua dimensi, namun belum optimal. Hal ini disebabkan oleh belum tersedianya SOP yang terstruktur, kurangnya sumber daya manusia, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan hukum, serta tidak meratanya akses masyarakat terhadap saluran informasi yang tersedia. Meskipun menghadapi berbagai hambatan, Sekretariat DPRD terus berupaya meningkatkan diseminasi kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan kesiapan yang matang

dengan memperhatikan seluruh indikator yang dapat mempengaruhi keberhasilan diseminasi kebijakan daerah.

Kata kunci: Sekretariat DPRD, Diseminasi, Kebijakan Daerah

PENDAHULUAN

Horoepoetri, Arimbi, dan Santosa menyatakan bahwa diseminasi merupakan suatu tindakan yang bertujuan kepada sasaran tertentu, baik individu maupun kelompok, dengan tujuan agar mereka mampu menyadari, memperoleh, menerima, dan pada akhirnya memanfaatkan informasi yang disampaikan (Riva'i, 2016:14). Lebih dari sekedar penyebaran informasi biasa, diseminasi juga dapat dipahami sebagai upaya inovasi yang terencana dan terorganisasi secara matang, dimana proses penyebarannya dirancang dengan mempertimbangkan orientasi jangka panjang melalui berbagai forum seperti diskusi atau kegiatan sejenis yang di susun secara sengaja, sehingga mendorong munculnya tindakan nyata dalam mengadopsi suatu inovasi (Kusumajanti, 2021). Diseminasi informasi merupakan salah satu bentuk komunikasi yang dilakukan dengan cara menyampaikan serta mendistribusikan informasi atau pesan yang berasal dari pihak pemerintah selaku komunikator kepada Masyarakat sebagai penerima informasi (Darmasetiadi, 2019). Melalui komunikasi publik yang terstruktur, pemerintah dapat menyampaikan informasi kebijakan, program pembangunan, serta capaian kinerja kepada masyarakat secara luas (Nurbaya, 2026:617).

Kebijakan atau dikenal sebagai *policy* merupakan serangkaian keputusan yang ditetapkan oleh seorang aktor atau kelompok dalam dunia politik, sebagai upaya untuk menentukan sasaran yang hendak dicapai beserta langkah-langkah strategis dalam mewujudkannya, dalam prinsip ini pihak-pihak yang berwenang dalam perumusan kebijakan tersebut memiliki otoritas penuh untuk menjalankan dan melaksanakan (Budiardjo, 2008:20). Suatu kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan perlu disampaikan serta di sebarluaskan kepada Masyarakat, dengan harapan agar kelompok sasaran dapat mengalami perubahan sikap dan perilaku sesuai dengan tujuan kebijakan (Purmayanti, 2022:324).

Berdasarkan Peraturan Bupati kabupaten Pangandaran nomor 44 tahun 2023 tentang tugas Pokok, Fungsi, uraian Tugas, dan Tata Kerja sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Secara teknis operasional, Sekretariat DPRD berkedudukan di bawah dan memiliki tanggung jawab langsung kepada pimpinan DPRD, sementara administratif pertanggung jawabannya disampaikan kepada Bupati melalui jalur Sekretaris Daerah. Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran berperan sebagai aparatur pendukung fungsi administratif kebijakan termasuk diseminasi informasi kebijakan melalui saluran seperti *website* resmi, media sosial, atau rapat koordinasi, untuk memfasilitasi transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Penggunaan teknologi digital dalam ranah pemerintahan mendorong terwujudnya konsep e-government yang diharapkan mampu memberikan manfaat nyata dalam memberdayakan Masyarakat, khususnya peningkatan kemudahan akses terhadap berbagai informasi yang dibutuhkan (Sujai et al., 2022:253)

Melihat kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat DPRD memiliki peranan penting dan menentukan efektivitas diaksanakannya fungsi DPRD, tidak hanya dalam aspek administrasi tetapi juga proses diseminasi kebijakan kepada

Masyarakat luas. Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran berperan sebagai jembatan informasi antara Lembaga legislatif daerah dengan masyarakat, yakni dengan memfasilitasi penyebaran produk-produk hukum, Keputusan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh DPRD melalui berbagai saluran komunikasi yang telah disediakan salah satunya pada *website* JDIH.

Meski demikian, peran Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran dalam Diseminasi Kebijakan belum merata secara optimal di seluruh wilayah Kabupaten Pangandaran. Hal ini terlihat dari adanya hambatan seperti belum adanya standar operasional prosedur (SOP) yang spesifik dan terstruktur, kurangnya ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang khusus di bidang digitalisasi yang mengakibatkan kurangnya pengelolaan pada *website* JDIH sebagai sarana utama dalam mengakses produk-produk hukum daerah, dan belum meratanya Masyarakat yang mengetahui saluran-saluran yang telah disediakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran yang berakibat minimnya pengetahuan Masyarakat pada digitalisasi.

Berdasarkan kondisi tersebut penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Diseminasi Kebijakan Daerah Di Kabupaten Pangandaran. Pada diseminasi kebijakan daerah maka fokus utama yaitu untuk melihat sejauh mana peran Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran dalam menyebarkan produk hukum daerah untuk masyarakat, untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel di Kabupaten Pangandaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Sekretariat DPRD dalam diseminasi kebijakan daerah dan untuk mengetahui implementasi kebijakan daerah di Kabupaten Pangandaran.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif sebagai upaya untuk melakukan analisis secara komprehensif dan mendalam terhadap permasalahan yang dikaji peran Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran dalam diseminasi kebijakan daerah. Metode penelitian kualitatif deskriptif dipilih karena untuk meneliti pada kondisi objek alamiah pada peneliti sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2022).

Lokasi penelitian berada di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran, dengan subjek penelitian yang terdiri atas Sekretaris DPRD, Perancangan peraturan perundang-undangan, Pratama Humas Ahli Muda dan Pengelola JDIH. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik *purposive*, yakni dengan memilih secara sengaja pihak-pihak yang dianggap memiliki pengetahuan serta keterlibatan secara langsung dalam proses penyebaran kebijakan daerah. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu penelusuran literatur kepustakaan, pengamatan langsung di lapangan, observasi, wawancara mendalam, serta pengumpulan dokumentasi yang relevan. (Silalahi, 2018:280).

Data yang diperoleh di analisis menggunakan tiga tahapan utama yaitu: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*). Reduksi data dilakukan dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan

polanya. Penyajian data dilakukan dengan teks yang bersifat naratif, dengan mendisplay data, maka akan memahami apa yang terjadi. Penarikan kesimpulan dilakukan kesimpulan awal dikemukakan bersifat sementara dan akan berubah bila tidak terdapat indikasi-indikasi yang cukup kuat dan meyakinkan yang dapat dijadikan sebagai landasan pendukung dalam proses pengumpulan data pada tahap selanjutnya. Miles & Hubberman (dalam sugiyono, 2013: 246). Untuk menjaga keabsahan data digunakan teknik trigulasi data dengan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori (Maleong, 2017:183).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Sebagai Suatu Kebijakan

Kebijakan dipahami sebagai sebuah panduan moral dan politis yang lahir dari pertimbangan matang untuk menyelesaikan suatu persoalan atau mencapai tujuan bersama. Hasil temuan peneliti menunjukkan bahwa peran sebagai suatu kebijakan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran belum berjalan dengan optimal. Hal ini tercermin dari belum tersedianya standar operasioanl prosedur (SOP) yang spesifik, terstruktur dan publikasi secara terbuka, serta belum optimalnya pengaloaksian sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi khusus di bidang digitalisasi informasi untuk mengelola Website JDIH sebagai publikasi kebijakan daerah. Sebagaimana dikemukakan oleh Horoepoetri, Arimbi, dan Santosa (dalam Riva'i, 2016:14) peran merupakan suatu kebijakan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.

Untuk mengatasi hal tersebut, Sekretariat DPRD telah mengevaluasi terhadap SOP yang ada serta mengusulkan penambahan pegawai baru yang berkopetensi di bidang teknologi informasi kepada BKPSDM, sebagai Langkah strategis menuju pengelolaan diseminasi kebijakan yang lebih terukur dan berkelanjutan.

Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan melalui struktur organisasi yang jelas telah berjalan optimal. Hal ini di buktikan dengan tersedianya sub-bagian yang secara khusus mengelola dokumentasi dan penyebarluasan kebijakan hukum kepada Masyarakat di bawah naungan bagian persidangan dan perundang-undangan. Kejelasan struktur tersebut mencerminkan komitmen kelembagaan dalam mendukung fungsi diseminasi kebijakan. Dengan demikian, penguatan terhadap aspek yang belum optimal perlu terus dilakukan agar dimensi peran sebagai suatu kebijakan dapat terwujud secara menyeluruh dan selaras pada prinsip tata Kelola pemerintahan yang baik.

2. Peran Sebagai Strategi

Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran tidak sekadar menjalankan fungsi administrasi kesekretariatan, melainkan bertindak sebagai jembatan penjamin akuntabilitas yang mendokumentasikan seluruh proses serap aspirasi (reses), rapat-rapat komisi, hingga formulasi produk hukum daerah secara transparan, yang pada akhirnya memperkuat kepercayaan sekaligus mengamankan dukungan penuh dari publik terhadap lembaga perwakilan rakyat tersebut.

Hasil temuan peneliti menunjukkan bahwa Tingkat pemahaman Masyarakat terhadap latar belakang, subtansi dan tujuan kebijakan yang diseminasikan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran belum berjalan dengan secara optimal.

Pemahaman Masyarakat merupakan fondasi utama bagi terciptanya kepedulian publik yang baik. Sebagaimana dikemukakan oleh Horoepoetri, Arimbi, dan Santosa (dalam Riva'i, 2016:14) bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari Masyarakat, Dimana Keputusan dan kepedulian Masyarakat yang terdokumentasi dengan baik akan memperkuat kredibilitas kebijakan tersebut. Hambatan tersebut salah satunya disebabkan kurangnya pemeliharaan *website* JDIH yang kerap mengalami kendala teknis serta belum meratanya pengetahuan Masyarakat mengenai keberadaan dan fungsi *platform* digital tersebut. Sehingga Masyarakat hanya mengetahui substansi kebijakan hukum secara umum tanpa memahami isi kebijakan secara mendalam. Sebagai Upaya penanganan Sekretariat DPRD kabupaten Pangandaran mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi kebijakan secara mendalam dan merata kepada seluruh Masyarakat.

Meskipun demikian. Aspek dari respon positif kelompok Masyarakat, tokoh maupun media terhadap kebijakan yang di sebarluaskan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran telah berjalan dengan optimal. Hal ini ditunjukkan dengan melalui pelaksanaan diseminasi kebijakan daerah yang telah berlangsung secara efektif dengan memanfaatkan teknologi informasi kebijakan hukum melalui website JDIH dan website resmi DPRD secara lebih mudah dan terbuka. Capaian respon positif ini mencerminkan bahwa Upaya diseminasi yang dilakukan Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran telah membangun kepercayaan publik di mata Masyarakat.

Pelaksanaan diseminasi kebijakan yang menyertakan dokumentasi dan data pendukung seperti naskah akademik maupun hasil kajian sebagai penganut dasar pengambilan Keputusan sudah berjalan dengan optimal. Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran secara konsisten menyediakan dokumen pendukung mulai dari naskah akademik, draf rancangan peraturan daerah hingga berkas hasil pembahasan Bapemda atau panitia khusus dalam setiap proses diseminasi kebijakan daerah. Ketersediaan dokumentasi yang lengkap dan terstruktur tersebut mencerminkan komitmen kelembagaan Sekretariat DPRD dalam memperkuat kualitas diseminasi kebijakan, sekaligus memastikan bahwa masyarakat memperoleh informasi yang komprehensif, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dari dari upaya menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

3. Peran Sebagai Alat komunikasi

Komunikasi berperan sebagai sarana atau media untuk memperoleh masukan berupa informasi dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan. Pandangan ini didasarkan pada gagasan bahwa pemerintah pada dasarnya dirancang dan dibentuk untuk melayani kepentingan masyarakat, sehingga aspirasi serta preferensi yang berasal dari masyarakat merupakan masukan yang sangat berharga guna menghasilkan keputusan yang bersifat responsif dan bertanggung jawab. Hasil temuan peneliti menunjukkan bahwa keaneka ragam informasi yang tersedia serta mekanisme penerimaan aspirasi Masyarakat di Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran menunjukkan rendahnya tingkat pengetahuan Masyarakat mengenai saluran komunikasi yang telah disediakan seperti website, media social, aplikasi Getar Melesat dan barcode yang terhubung

langsung pada website JDIH, menjadi hambatan utama yang menyebabkan minimnya interaksi publik ke saluran-saluran tersebut.

Sebagai Upaya penanggulangannya Sekretariat DPRD merencanakan sosialisasi secara menyeluruh dan terstruktur kepada seluruh lapisan masyarakat, mencakup optimalisasi media sosial resmi, penayangan iklan layanan masyarakat, sosialisasi berbasis komunitas, serta pemasangan media publikasi fisik berupa *banner* atau pamflet yang memuat kode QR menuju situs JDIH di pusat-pusat keramaian publik, sehingga diharapkan dapat memperluas cakupan diseminasi kebijakan daerah secara signifikan.

Berdasarkan hasil observasi tindak lanjut atau penggunaan masukan masyarakat dalam proses perumusan maupun revisi kebijakan di Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran menunjukkan kondisi yang telah berjalan secara optimal. Setiap masukan yang diterima dari masyarakat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan maupun evaluasi kebijakan pada agenda seminar naskah akademik serta sesi sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), di mana berbagai lembaga terkait beserta masyarakat turut aktif memberikan saran dan pendapat pada saat audiensi dilaksanakan, sehingga aspirasi publik secara nyata terintegrasi ke dalam proses legislasi daerah.

4. Peran sebagai Alat Penyelesaian Sengketa

Hasil temuan peneliti menunjukkan bahwa keterbukaan dan kejelasan informasi yang diseminasikan guna mengurangi kecurangan, serta penurunan jumlah protes keluhan publik akibat minimnya informasi di Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran menunjukkan kondisi yang sudah berjalan optimal.

Keterbukaan informasi publik yang diterapkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran merupakan wujud nyata dari pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang transparan, sehingga potensi terjadinya kesenjangan informasi yang kerap menjadi pemicu kecurangan dan ketidakpercayaan publik dapat diminimalisasi secara efektif. Selain itu, Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran juga telah menjalankan peran sebagai fasilitator yang baik dalam menjembatani komunikasi antara masyarakat dan lembaga terkait, di mana setiap keluhan atau aduan dari masyarakat ditangani secara langsung dengan memanfaatkan media digital sebagai sarana klarifikasi, sehingga intensitas protes dan ketidakpuasan publik yang disebabkan oleh ketidaktahuan terhadap kebijakan daerah dapat ditekan secara signifikan.

Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran telah menjalankan perannya dalam komunikasi politik dan sosial di daerah secara konsisten dan terstruktur, dengan memfasilitasi forum-forum dialog yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan guna mencegah dan menyelesaikan potensi konflik yang muncul di tengah masyarakat. Hal ini mencerminkan bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran tidak hanya berfungsi sebagai lembaga administratif semata, melainkan juga berperan aktif sebagai mediator komunikasi yang efektif antara institusi legislatif daerah dan masyarakat, sehingga harmonisasi hubungan antara pemerintah daerah dan publik dapat terjaga dengan baik dalam rangka mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang kondusif, partisipatif, dan akuntabel.

5. Peran Sebagai Terapi

Hasil temuan peneliti menunjukkan bahwa persepsi masyarakat bahwa pandangan mereka dipertimbangkan dan bernilai dalam proses kebijakan, serta indikator peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan yang diselenggarakan Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran menunjukkan kondisi yang telah berjalan secara optimal.

Mekanisme pengelolaan masukan masyarakat telah berjalan melalui sistem yang terstruktur, baik dari segi alur birokrasi maupun pendokumentasian data fisik, yang meliputi pelaksanaan forum partisipatif, penyusunan laporan kebijakan dan rekomendasi pembahasan, hingga penyampaian aspirasi kepada pimpinan DPRD yang selanjutnya dikomunikasikan kembali kepada masyarakat setelah proses pembahasan antara pimpinan DPRD dan komisi terkait diselesaikan. Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran telah memberikan ruang yang resmi dan terstruktur bagi masyarakat, dinas instansi, serta lembaga terkait untuk menyampaikan aspirasi dan saran dalam penyusunan kebijakan daerah, yang dibuka secara formal pada tahapan penyusunan naskah akademik dan sinkronisasi rancangan peraturan daerah. Keterbukaan ruang partisipasi tersebut memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang nyata dalam proses penyusunan kebijakan daerah, sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat top-down melainkan juga mencerminkan aspirasi dan kebutuhan publik secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, Peran Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran dalam diseminasi kebijakan daerah secara keseluruhan telah berjalan pada seluruh dimensi, namun belum berjalan secara optimal akibat sejumlah hambatan yang masih ditemukan, di antaranya belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang spesifik, terstruktur, dan dipublikasikan secara terbuka, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten di bidang digitalisasi informasi, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap substansi kebijakan yang didiseminasikan, serta minimnya pengetahuan publik terhadap saluran-saluran komunikasi yang telah disediakan, khususnya *Website* JDIH sebagai media penyampaian produk hukum dan kebijakan daerah. Guna mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diperlukan upaya yang sistematis dan berkelanjutan meliputi penyusunan SOP diseminasi yang terstruktur, pengusulan penambahan pegawai yang kompeten di bidang pengelolaan informasi digital kepada BKPSDM, optimalisasi sosialisasi edukatif secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat, penyediaan tenaga ahli serta pelatihan berkala bagi aparatur pengelola *Website* JDIH, hingga pelaksanaan sosialisasi berbasis komunitas yang didukung oleh pemasangan media publikasi fisik berupa *banner* atau pamflet berkode QR di pusat-pusat keramaian publik, sehingga aksesibilitas masyarakat terhadap informasi kebijakan daerah dapat meningkat secara signifikan dan diseminasi kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.



- Darmasetiadi, D. (2019, April). Optimalisasi Diseminasi Informasi Pada Mitigasi Bencana. In *Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu* (Vol. 1, No. 1).
- Denzin dalam Moleong, L. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kusumajanti, K., & Nashier, A. K. (2021). Peran Media Massa dalam Mendukung Upaya Diplomasi Indonesia terhadap Isu Perbatasan dengan Cina. *Ekspresi Dan Persepsi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(2), 259-268.
- Nurbaya, R. (2026). The Mediatization of Government: Peran Forum Wartawan dalam Membentuk Narasi Resmi di Kementerian Perindustrian: Dinamika Relasi Media dan Birokrasi dalam Diseminasi Kebijakan Sektor Industri. *Jurnal Media Informatika*, 7(2), 617-623.
- Peraturan Bupati kabupaten Pangandaran nomor 44 tahun 2023 tentang tugas Pokok, Fungsi, uraian Tugas, dan Tata Kerja sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
- Purmayanti, I. A. (2022). Strategi Diseminasi Kebijakan Uji Emisi Kendaraan Bermotor di Kota Bandung. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 6(1), 322-326.
- Riva'i, A. K. (2016). *Komunikasi Sosial Pembangunan*. Pekanbaru: HAWA DAN AHWA
- Silalahi, U. (2018). *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sujai, I., Aditiyawarman, A., Nursetiawan, I., & Yuliani, D. (2022). Analisis Budaya Literasi Digital Pemerintah Desa Sadananya Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 9(2), 252-259.